

**PENGARUH KOMPETENSI DIGITAL APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI INDONESIA**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik



DISUSUN OLEH:

Nama: Alicia Zhafira Hanum

NPM: 2456041039

Kelas: Mandiri B

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

TAHUN 2025/2026

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendahuluan

Penelitian dengan pendekatan kualitatif memiliki relevansi tinggi dalam studi administrasi negara Indonesia, terutama ketika menyingkap persoalan keberagaman berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan). Pendekatan kualitatif tidak sekadar menampilkan data dalam bentuk angka, tetapi berupaya menggali makna sosial, nilai, dan pengalaman yang menyelimuti kehidupan sosial masyarakat yang heterogen. Dalam konteks administrasi publik, metoda kualitatif memungkinkan untuk memahami interaksi sosial dan konflik identitas yang kerap muncul, serta dinamika birokrasi yang melayani masyarakat beragam dengan cara yang responsif dan sensitif terhadap perbedaan (Gedeona, 2010).

Indonesia sendiri, sebuah negara multikultural dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah, menghadapi tantangan administrasi yang sangat kompleks. Masalah sosial akibat politisasi identitas dan konflik SARA bukan sekadar persoalan statistik, melainkan pengalaman langsung yang memengaruhi pola hubungan sosial dan administrasi negara di berbagai wilayah (Aryani, 2018).

Dengan menggunakan metode kualitatif seperti wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), serta observasi partisipatif, penelitian ini mengumpulkan data empiris yang kaya akan konteks dan nuansa sosial budaya. Contoh riset di Kepulauan Riau dan Bali menunjukkan bahwa dialog antar komunitas dan pemahaman kultural birokrat berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial (Prayogo, 2022; Suryanto, 2021).

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana birokrasi dalam administrasi publik Indonesia menyikapi keberagaman secara inklusif dan mediatif. Pendalaman kualitatif ini penting untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam kerangka negara yang pluralistik.

B. Pendekatan Kualitatif dalam Administrasi Negara

Pendekatan kualitatif dalam administrasi negara fokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks, proses, dan makna tindakan birokrat dan masyarakat. Studi ini berupaya memahami

bagaimana aparat publik dan warga saling berinteraksi, membangun kepercayaan, dan mengelola struktur sosial yang kompleks, khususnya terkait penyelesaian konflik SARA.

Lapian (2023) melakukan studi kualitatif di Sulawesi Utara yang mengungkap bagaimana tokoh adat dan pejabat daerah melakukan diplomasi budaya sebagai upaya mediasi sosial. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kebijakan informal yang efektif dalam mengelola keragaman, kebijakan yang tidak terekam dalam data statistik (Lapian, 2023).

Selain itu, pendekatan kualitatif membuka pemahaman pada praktik adaptasi birokrasi terhadap budaya lokal dan pengelolaan keberagaman melalui penggunaan bahasa daerah dan pengakuan nilai budaya. Penelitian Siregar (2022) menunjukkan bahwa strategi informal tersebut berkontribusi memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan pelayanan publik di daerah multikultural.

Secara metodologis, penelitian kualitatif mengandalkan purposive sampling untuk menjangkau subjek yang memiliki pengalaman dan pengetahuan kaya, dengan teknik analisis tematik yang membedah pola komunikasi, kekuasaan, dan inklusivitas dalam birokrasi (Gedeona, 2010). Penelitian ini juga mendorong pemahaman kritis terhadap konflik dan integrasi sosial yang berlangsung di masyarakat, yang dapat memperkaya kebijakan administrasi negara.

C. Teknik Pengumpulan Data Kualitatif

Data kualitatif dikumpulkan melalui beberapa teknik utama, yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam memberi gambaran utuh dan mendalam:

- **Wawancara Mendalam:** Teknik yang memungkinkan dialog intens antara peneliti dan informan seperti pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga terdampak. Studi Suryanto (2021) menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan pejabat birokrasi di Jawa Timur untuk memahami dinamika pengelolaan konflik SARA. Hasil wawancara mengungkap kendala birokrasi, persepsi warga, serta strategi mediasi yang dipakai (Suryanto, 2021).
- **Focus Group Discussion (FGD):** FGD mengundang perwakilan berbagai kelompok etnis dan agama dalam forum terbuka yang bertujuan menggali pendapat, mencari solusi, dan membangun konsensus. Rahman & Fitriani (2020) memanfaatkan FGD di Aceh untuk memfasilitasi dialog lintas komunitas yang memunculkan rasa saling

pengertian yang lebih baik. FGD juga memungkinkan pengamatan interaksi sosial secara langsung (Rahman & Fitriani, 2020).

- Observasi Partisipatif: Dalam penelitian Haryanto (2019), observasi partisipatif digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana birokrasi dan masyarakat berinteraksi dalam konteks administrasi daerah transmigrasi di Kalimantan, mengamati adaptasi birokrat terhadap nilai budaya lokal dan kebutuhan multikultural. Teknik ini memberikan pemahaman kontekstual yang tidak tergantikan (Haryanto, 2019).

Setelah pengumpulan, data dianalisis menggunakan teknik coding tematik dengan bantuan software NVivo, yang membantu mengelompokkan data ke dalam tema sentral seperti mediasi, konflik, dan inklusivitas. Triangulasi data dari berbagai metode dan sumber memperkuat validitas penelitian (Moleong, 2017).

D. Studi Kasus Implementasi Kebijakan Multikultural

Penelitian kualitatif yang komprehensif terkait implementasi kebijakan multikultural di daerah rawan SARA menunjukkan kerumitan dan tantangan nyata di lapangan. Prayogo (2022) dalam studinya di Bali mendapati bahwa pembentukan forum lintas agama dan suku menjadi mekanisme efektif untuk membangun dialog, mencegah konflik, dan menumbuhkan rasa penghargaan antar kelompok.

Wawancara dengan pejabat daerah dan tokoh agama menguatkan bahwa keberhasilannya terletak pada pendekatan inklusif yang menjembatani kepentingan dan nilai-nilai budaya lokal sekaligus menegakkan aturan negara (Prayogo, 2022). Studi serupa oleh Arifin (2019) di Sulawesi Selatan menggarisbawahi perlunya pengakuan terhadap tradisi lokal sebagai landasan sosial yang menguatkan stabilitas dan memperkuat integrasi sosial.

Selain itu, birokrasi dipandang bukan hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang harus peka terhadap konteks sosial dan budaya agar kebijakan multikultural dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat (Dewi & Rahman, 2019). Hal ini menuntut peningkatan kapasitas dan pelatihan aparat dalam mengelola keberagaman secara sensitif.

E. Analisis Data dan Validitas

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses sistematis untuk memahami makna, pola, dan narasi yang muncul dari data yang terkumpul di lapangan (Denzin & Lincoln, 2011). Dalam konteks penelitian ini yang mengkaji administrasi negara dalam keberagaman SARA di Indonesia, analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif dan interpretatif, sehingga peneliti dapat mengembangkan teori dan pemahaman berdasarkan realitas sosial yang dianalisis secara mendalam.

Pendekatan induktif ini memungkinkan peneliti untuk membangun makna dari bawah ke atas, yaitu dari data empiris di lapangan yang bersumber dari wawancara mendalam dengan aparatur negara, tokoh masyarakat, serta warga yang merasakan dampak langsung kebijakan keberagaman. Teknik analisis yang dipakai meliputi naratif analysis dan coding tematik (Gedeona, 2010). Coding tematik membagi data menjadi tema-tema utama yang relevan, seperti strategi birokrasi mengelola konflik SARA, pengalaman mediasi sosial, dan persepsi masyarakat terhadap inklusivitas kebijakan publik.

Ketika menghadapi fenomena kompleks keberagaman SARA, proses analisis kualitatif harus mampu mengurai nuansa hubungan sosial yang tidak selalu tampak dalam statistik. Misalnya, bagaimana administrasi negara menangani perbedaan suku dan agama yang berakar pada nilai budaya lokal, serta dinamika kekuasaan antar kelompok, menjadi pokok kajian yang dikupas dalam tema-tema analisis. Dari sini, peneliti menyoroti praktik informal birokrasi yang bersinergi atau kadang bertentangan dengan aturan formal agar tercipta harmoni sosial.

Validitas hasil penelitian kualitatif dijaga secara ketat melalui beberapa mekanisme. Salah satunya adalah triangulasi data, yang berarti menggunakan berbagai sumber dan metode pengumpulan data agar hasil lebih terpercaya dan bias diminimalkan (Creswell & Poth, 2018). Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara dengan aparatur negara dan tokoh masyarakat, diskusi kelompok, dan observasi lapangan. Dengan demikian, gambaran tentang pengelolaan keberagaman bukan hanya satu perspektif, melainkan terpadu dari berbagai sudut pandang yang saling menguatkan.

Selanjutnya, validitas juga diperkuat melalui member checking, yaitu proses di mana hasil analisis atau temuan penelitian dikonfirmasi kepada informan agar interpretasi peneliti tidak menyimpang dari pengalaman dan pandangan mereka (Moleong, 2017). Misalnya, jika dalam wawancara sejumlah aparat negara menyebutkan kendala dalam mediasi konflik SARA,

peneliti akan menyampaikan kembali hasil analisis kepada mereka untuk ditinjau kebenarannya.

Selain itu, keotentikan data (authenticity) juga menjadi hal utama yang dibangun dalam penelitian kualitatif, sehingga bukan hanya sekadar reliabilitas atau konsistensi data, tetapi kejujuran dan integritas dalam merekam pengalaman sosial. Dalam konteks administrasi negara di Indonesia, hal ini sangat penting mengingat sensitivitas isu SARA yang memerlukan pendekatan yang mulus dan penuh penghormatan (Denzin & Lincoln, 2011).

Refleksivitas peneliti menjadi bagian integral untuk menjaga validitas analisis. Peneliti secara kritis merefleksikan posisi dan pengaruh dirinya selama proses wawancara dan interpretasi data agar bias personal dan subjektivitas dapat dikendalikan. Misalnya, seorang peneliti yang berasal dari kelompok tertentu harus sadar akan persepsi budaya dan bias implisitnya agar tidak menghakimi fenomena yang sedang dikaji (Moleong, 2017).

Kaitan erat antara analisis data dan validitas dengan judul penelitian ini, yaitu mengenai perspektif administrasi negara dalam keberagaman SARA, terletak pada kemampuan metode kualitatif yang memunculkan pemahaman holistik dan mendalam terhadap bagaimana birokrasi dan masyarakat berinteraksi, memelihara kerukunan, dan menyelesaikan konflik berbasis identitas. Hasil analisis yang valid dapat dijadikan dasar kebijakan publik yang adaptif dan inklusif, memastikan bahwa kebijakan keberagaman tidak hanya teks formal, melainkan hidup dan efektif dalam masyarakat pluralistik Indonesia.

Dengan pemahaman yang diperoleh dari analisis kualitatif, kebijakan administrasi negara dapat dirancang lebih responsif terhadap kompleksitas sosial, menangkap dinamika budaya, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Inilah kekuatan utama penelitian kualitatif dalam ranah administrasi publik, menembus data permukaan menjadi wawasan yang bermakna dan transformatif.

Daftar Pustaka

- Aryani, D. (2018). Kehidupan sosial dan konflik di Kepulauan Riau. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 12(1), 45-63.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research* (4th ed.). Sage Publications.
- Dewi, Y., & Rahman, F. (2019). Studi kualitatif kebijakan multikultural di Indonesia. *Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, 14(2), 101-120.
- Gedeona, H. T. W. (2010). Pendekatan kualitatif dan kontribusinya dalam penelitian administrasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(2), 23-36.
- Haryanto, R. (2019). Observasi partisipatif dalam pemerintahan multikultural. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 88-101.
- Lapian, A. R. (2023). Diplomasi budaya dalam pengelolaan konflik etnis di Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 18(3), 144-159.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Prayogo, M. (2022). Implementasi multikulturalisme dalam birokrasi daerah Bali. *Jurnal Studi Pemerintahan Daerah*, 10(1), 23-42.
- Rahman, A., & Fitriani, D. (2020). Pengelolaan konflik SARA melalui FGD di Aceh. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(1), 67-79.
- Siregar, M. A. (2022). Strategi adaptasi kebiasaan lokal dalam pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan*, 9(2), 56-74.
- Suryanto, N. (2021). Respons birokrat terhadap konflik SARA di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(4), 190-205.